

**KINERJA ORGANISASI BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM
PENGELOLAAN ASET TETAP**

Oleh :

Alfian Noor Izzat, Mochammad Mustam

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos

1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Regional autonomy as a momentum underlying local independence in the management of local fixed assets, but many autonomous regions including the Government of Semarang Regency are not yet optimal in managing their owned assets. The purpose of this research is to describe the organization's performance in Asset Management Division of Regional Finance Agency (BKUD) Semarang Regency in the management of fixed assets. This research uses descriptive qualitative research design. The informants in this research were heads of regional asset management, three heads of sub-division of asset management, staff and some communities. Data collection techniques is by interview, observation, documentation. Performance appraisal in this research use four indicator that is Accountability, Effectiveness, Efficiency and Transparency. Based on the results of research, it can be concluded that the organizational performance of the Regional Asset Management Division of Regional Finance Agency of Semarang Regency in the management of fixed assets needs to be improved again. This is because there are still some obstacles in the management of fixed assets such as, weak coordination of the Regional Asset Management Division with other OPD, has no fixed asset storage, still lack of transparency, low staff numbers and low staff competence, inadequate facilities and infrastructure. Suggestion given by the researcher is improvement of continuous coordination with external parties (OPD-OPD, BPN, and Village Government related to land certification process), the addition of competent human resources, organizing staff training on IT, looking for alternative place for asset storage, improve transparency, and procurement of additional facilities and infrastructure.

Keywords : *Organizational Performance, Fixed Asset, Infrastructure, Coordination, Human Resources.*

ABSTRAK

Otonomi daerah sebagai momentum yang mendasari kemandirian daerah dalam pengelolaan aset tetap daerah, namun banyak daerah otonom termasuk Pemerintah Kabupaten Semarang yang belum optimal dalam mengelola aset tetap yang dimiliki. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja organisasi pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala bidang pengelolaan aset daerah, tiga kepala subbidang pengelolaan aset daerah, staf bidang pengelolaan aset daerah, dan sebagian masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Penilaian kinerja dalam penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi dan Transparansi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset tetap seperti, lemahnya koordinasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, belum punya tempat penyimpanan aset tetap, masih kurang transparan, minimnya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai yang rendah, serta kurang memadainya sarana dan prasarana. Saran yang diberikan peneliti yaitu peningkatan koordinasi berkelanjutan dengan pihak-pihak eksternal (OPD-OPD, BPN, dan Perangkat Desa yang lama kaitannya dengan proses sertifikasi tanah), penambahan SDM yang berkompeten, perlunya diklat pegawai mengenai IT, mencari tempat alternatif untuk penyimpanan aset, peningkatan transparansi, serta pengadaan penambahan sarana prasarana.

Kata kunci: *Kinerja Organisasi, Aset Tetap, Sarana Prasarana, Koordinasi, Sumber Daya Manusia.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan dari organisasi untuk dicapai. Pencapaian tujuan sebuah organisasi menunjukkan hasil kerja atau kinerja organisasi yang bersangkutan. Begitupun seperti organisasi publik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang mempunyai tujuan yang akan dicapai

Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Semarang yang bertugas untuk mengelola keuangan daerah serta aset yang dimiliki daerah. Bidang Pengelolaan Aset Daerah adalah salah satu bidang di BKUD yang mempunyai tugas untuk mengelola aset tetap atau barang milik daerah di Kabupaten Semarang. Keberhasilan Bidang Pengelolaan Aset Daerah bisa dinilai dari seberapa baik kinerja organisasi.

Wibowo (2007:67) mengemukakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan suatu organisasi agar mempunyai kinerja yang baik, yaitu menyangkut tentang maksud dan nilai-nilai, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kinerja, fungsionalisasi, budaya dan kerja. Dari pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja organisasi. Peneliti mengambil empat dimensi untuk mengukur kinerja organisasi diantaranya, efektifitas; akuntabilitas; efisiensi; dan transparansi dimana keempat komponen tersebut penting untuk dikaitkan dengan permasalahan yang ada pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang.

Berdasarkan proses wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan serta

sumber data sekunder yang telah dihimpun oleh peneliti ditemukan beberapa kendala seperti, pengelolaan aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah belum optimal (belum tersertifikasi), belum adanya pengamanan yang memadai terhadap aset tetap daerah (belum punya gudang aset), kurangnya koordinasi dari Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan pihak eksternal, belum tersedianya informasi bagi masyarakat mengenai aset tetap yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh Pemkab Semarang, minimnya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai yang rendah, serta kurang memadainya sarana dan prasarana.

Salah satu sasaran dari BKUD adalah meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah, jumlah sertifikat tanah dan pemasangan plang menjadi salah satu indikator yang capaian kinerjanya belum memenuhi target dimana realisasinya hanya 106 target dengan target awal 114 sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas pengelolaan aset tetap daerah, khususnya mengenai sertifikasi tanah milik daerah dan pemasangan plang tanda kepemilikan tanah masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah masih kurang dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah milik daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah juga menghadapi kesulitan dalam menilai aset tetap yang dimiliki pemerintah seperti peralatan operasional kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi objektif aset tetap dan pencatatan serta pelaporan aset tetap yang tidak tertib oleh beberapa OPD juga menjadi masalah tersendiri. Penyusunan RKBMD oleh beberapa OPD juga terkadang tidak tertib. Hal semacam ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengarahan, sosialisasi, dan koordinasi dari Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Permasalahan lainnya yaitu belum adanya gudang aset untuk

pengamanan aset tetap sehingga aset tetap yang tidak atau belum diberdayakan disimpan sementara di halaman belakang Gedung Pemuda Ambarawa, Implikasi dari penyimpanan barang milik daerah di halaman belakang Gedung Pemuda Ambarawa adalah pengamanan yang kurang.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah juga menghadapi kendala terkait dengan sarana prasarana yang masih minim, terlebih saat ini sedang dalam proses pengembangan (SIM) Sistem Informasi Manajemen Aset yang membutuhkan peningkatan sarana prasarana memadai seperti komputer, sistem jaringan, dan kelengkapan lainnya. Minimnya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai yang rendah atau tidak sesuai kebutuhan juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan program kerja secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan diatas menunjukkan belum optimalnya kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam mewujudkan visi organisasi, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang. Pada Penelitian ini, penulis mengambil judul **“Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Aset Tetap”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap ?

C. Tujuan Penelitian

Mendesripsikan kinerja organisasi pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap.

D. Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam buku teori administrasi publik (Pasolong, 2007:17) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik sebagai salah satu cabang ilmu juga mempunyai perkembangan (paradigmanya) sendiri. Berkaitan dengan permasalahan yang diambil, maka fokus paradigma yang digunakan adalah paradigma *New Public Service* (NPS). Paradigma NPS lebih berorientasi pada masyarakat sebagai kelompok yang harus dilayani bukan para birokrasi yang justru meminta untuk dilayani. Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis kinerja organisasi.. Sedangkan lokus dari penelitian ini adalah Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD.

2. Organisasi

Luther Gulick dalam (Inu Kencana Syafii, 2006:52) mengungkapkan suatu organisasi adalah sebagai suatu alat saling berubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dalam suatu organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Anggota organisasi atau yang biasanya dikatakan sebagai bawahan dan atasan memiliki tugas untuk dapat mencapai tujuan organisasi di dalamnya. Sehingga, dibutuhkan adanya kinerja di dalam organisasi untuk mendorong terciptanya kemampuan organisasi. Begitupun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang mempunyai visi yaitu “Terselenggaranya pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien dan efektif

berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

3. Manajemen Publik

Pada dasarnya manajemen publik adalah manajemen atau pengelolaan pada suatu instansi pemerintah. Overman dalam (Pasolong,2011:83) yang mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*”, meskipun manajemen publik sangat dipengaruhi oleh “*scientific management*”. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Badan Keuangan Daerah (BKUD) sebagai organisasi publik di tingkat Kabupaten Semarang sudah seharusnya menjalankan manajemen publik secara efektif dan efisien, serta berorientasi pada masyarakat.

4. Kinerja

Bernardin menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. (dalam Sudarmanto, 2009:8). Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerja organisasi dan menunjukkan bagaimana kinerja atau performa organisasi dapat tercapai. Seperti halnya masalah yang dihadapi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD, akan bisa terselesaikan apabila di dalam organisasi ditumbuhkan prinsip-prinsip kinerja yang baik. Pada penelitian ini, peneliti mengambil satu pokok pembahasan, yakni kinerja organisasi. Peneliti akan mengukur bagaimana kinerja organisasi dari Bidang

Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang.

4. Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi selalu menjadi isu aktual di dalam suatu organisasi, hal ini dikarenakan kinerja merupakan kunci apakah organisasi tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Menurut Wibawa dan Atmosudirdjo, kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kebutuhannya secara efektif (dalam Pasolong, 2011:176). Kinerja organisasi erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, perencanaan serta manajemen yang ada dalam organisasi. Penelitian ini berfokus pada kinerja organisasi dan berlokus di organisasi publik.

5. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan beberapa pengukuran kinerja organisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Mardiasmo, Dwiyanto, Ratminto dan Wiharsih, serta Bastian, peneliti merumuskan beberapa hal penting dalam menilai kinerja organisasi dalam rangka penelitian di Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang, yaitu :

- a) Efektifitas, merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi

(Ratminto dan Winarsih, 2005:179).

- b) Akuntabilitas, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat (Ratminto & Winarsih, 2005:181). Akuntabilitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam implementasikan kebijakan dan kegiatan secara konsisten.
- c) Efisiensi, berarti penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (Mardiasmo, 2004:105). Efisien berarti setiap pekerjaan atau tugas dapat dikerjakan dengan cara yang baik, benar, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Efisiensi dinilai dari penggunaan aset tetap apakah telah digunakan sebagaimana mestinya atau belum yaitu untuk mencukupi kebutuhan daerah.
- d) Transparansi, yaitu prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta (Ratminto & Winarsih, 2005 :182). Mardiasmo menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo,2004 : 30).

6. Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah dapat diartikan sebuah proses menyelenggarakan dengan mengerahkan segenap usaha dan sumber

daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti penggunaan atau pemanfaatan aset daerah diarahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Aset diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya (Mahmudi, 2007: 63). Aset tetap antara lain terdiri atas: tanah, jalan dan jembatan, bangunan instalasi air, instalasi pengolahan bahan bangunan, jaringan air, jaringan listrik, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, perlengkapan (meliputi inventaris dan perlengkapan kantor, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, dan lain-lain), dan buku perpustakaan (Abdul Halim,2004:78-79).

E. Fenomena Penelitian

Kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap dilihat dari beberapa dimensi, yaitu :

- 1. Efektivitas, mencakup :
 - a. Kesesuaian program kegiatan yang dijalankan Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan target dan sasaran
 - b. Keberhasilan program kegiatan yang dijalankan Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - c. Kendala dan hambatan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Tetap
- 2. Akuntabilitas, mencakup :
 - a. Pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - b. Hubungan timbal balik atau kerjasama Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - c. Kesesuaian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan peraturan dan kebijakan
- 3. Efisiensi, meliputi :
 - a. Perencanaan, pengadaan dan penggunaan aset tetap berkaitan dengan pencukupan kebutuhan daerah

- b. Pemanfaatan aset tetap dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Transparansi, mencakup :
- a. Keterbukaan dalam penyampaian informasi tentang pengelolaan aset tetap daerah kepada publik
 - b. Upaya peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset tetap daerah
 - c. Kendala dan hambatan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan transparansi

F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis bermaksud mendeskripsikan kinerja organisasi pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, tiga Kepala Sub Bidang, Satu Staf Bidang, dan satu masyarakat. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, untuk menguji keabsahan data yang digunakan.

PEMBAHASAN

1. Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang sebagai Organisasi Publik

Berdirinya Badan Keuangan Daerah sebagai organisasi publik di lingkup Kabupaten Semarang tidak terlepas dari kebijakan Otonomi Daerah yang telah mendasari organisasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan-perubahan,

seperti pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sesuai pasal 2 Perda Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan pasal 52 Perbup Semarang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Penelitian ini memiliki fokus dan lokus sesuai dengan kajian administrasi publik. Fokus penelitian ini yaitu kinerja organisasi sebagai salah satu aspek dari manajemen publik atau manajemen organisasi publik. Sedangkan lokus yaitu organisasi publik yang sering dilihat sebagai organisasi pemerintah atau birokrasi pemerintah dalam hal ini adalah BKUD Kabupaten Semarang khususnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

2. Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Aset Tetap sebagai Kajian Manajemen Publik

Organisasi publik dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal apabila terdapat manajemen publik yang berkualitas sehingga berimplikasi pada kinerja organisasi yang meningkat. Manajemen publik dan kinerja merupakan dua hal berbanding lurus dan saling berkaitan. Penelitian ini membahas tentang kinerja organisasi publik yang merupakan gambaran atau hasil kerja atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang dibentuk dan disusun oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi. Sesuai dengan Paradigma *New Public Service* (J. V. Denhardt & R. B. Denhardt), kondisi yang seharusnya ada BKUD khususnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah adalah manajemen publik yang berorientasi pada

kinerja. Kinerja organisasi yang dicapai berbanding lurus dengan manajemen publik yang dijalankan, maka dari itu kinerja merupakan bagian penting dari suatu manajemen publik.

3. Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Aset Tetap

Pada penelitian ini penilaian kinerja organisasi menggunakan empat dimensi kinerja organisasi, yaitu, efektifitas, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Berikut penjabarannya :

1. Efektifitas

Pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan Bidang Pengelolaan Aset Daerah ada yang sudah sesuai dan belum sesuai target dan sasaran. Program dan kegiatan yang belum memenuhi target dan sasaran dalam dokumen RKPD dan LKjIP adalah persertifikatan tanah dan pemasangan plang. Kualitas pengelolaan aset daerah pada tahun 2016 mencapai 98,60%.

Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan dapat dikategorikan dari segi kuantitas dan segi kualitas. Dari segi kuantitas yaitu keberhasilan realisasi program kegiatan hingga 100%, walaupun ada program dan kegiatan yang realisasinya belum mencapai target yaitu program sertifikasi tanah dan penempatan plang. Sedangkan dari segi kualitasnya, pelaksanaan program kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah sudah cukup baik tercermin dari penyusunan Neraca Aset yang berkontribusi terhadap LKPD Kabupaten Semarang.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Tetap cukup kompleks dan beragam. Kendala tersebut meliputi keterbatasan SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan, kendala lainnya berkaitan

dengan setiap OPD tidak serius dalam menyusun RKBMD dan terkadang tidak disiplin waktu dalam melaporkan aset yang digunakan. Bidang ini juga belum punya gudang aset, dimana gudang aset fungsinya sangat penting. Dalam proses sertifikasi tanah juga mengalami kendala dalam identifikasi data fisik tanah letak, perolehannya maupun alas haknya serta kendala dari pihak BPN. Sarana prasarana penunjang juga masih minim, terlebih sekarang sedang dilakukan proses pengembangan SIM Aset yang membutuhkan sarana prasarana yang memadai.

2. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibuat secara tertulis seperti SPJ, laporan keuangan/ anggaran, laporan semesteran, laporan akhir tahun, laporan kegiatan, laporan Neraca Aset. Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyusun Neraca Aset yang berisi seluruh daftar aset tetap yang dimiliki daerah. Alur dalam pertanggung jawaban adalah Bidang Pengelolaan Aset Daerah bertanggung jawab kepada Kepala BKUD, lalu BKUD bertanggung jawab kepada bupati dan kemudian laporan keuangan termasuk neraca aset didalamnya diaudit oleh BPK. Setelah diaudit oleh BPK kemudian dilaporkan ke DPRD dan setelah diterima oleh DPRD maka laporan keuangan tersebut dipublikasikan.

Hubungan timbal balik atau kerjasama yang dilakukan Bidang Pengelolaan Aset Daerah meliputi hubungan timbal balik dengan setiap Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna barang. Hubungan timbal balik atau kerjasama dilakukan dengan berkoordinasi dan rekonsiliasi dalam penyusunan Neraca Aset yang kredibel. Kerjasama juga dilakukan dengan pihak ketiga dalam pembangunan fasilitas publik dan pembelian barang seperti kendaraan dinas motor dan mobil, ATK,

serta peralatan lainnya. Hubungan timbal balik dengan masyarakat terkait kegiatan penyewaan gedung dan kegiatan pelelangan aset daerah.

Pelaksanaan tugas dari Bidang Pengelolaan Aset Daerah dijalankan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realita di lapangan terkadang tidak seperti yang diharapkan, jadi terkadang dalam pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

3. Efisiensi

Efisiensi dinilai apakah penggunaan aset tetap telah digunakan sebagaimana mestinya atau belum yaitu untuk mencukupi kebutuhan daerah. Untuk daerah Kabupaten Semarang sendiri, dana alokasi untuk kebutuhan telah mencukupi kebutuhan daerah, serta aset tetap yang dimiliki oleh daerah telah digunakan dengan optimal untuk kepentingan setiap Perangkat OPD dan dimanfaatkan masyarakat. Perencanaan, pengadaan dan penggunaan aset tetap berkaitan dengan pencukupan kebutuhan daerah sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan kerja. Perencanaan dan pengadaan aset tetap berkaitan dengan pencukupan kebutuhan daerah secara regulasi dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari tahap penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu dalam bentuk layanan penyewaan aset tetap seperti sewa gedung dan tanah. Terdapat dua gedung yang disewakan, Gedung Pemuda Ambarawa dan Gedung IPHI. Aset tanah milik daerah ada yang disewakan untuk pihak swasta maupun

masyarakat. Pemanfaatan aset tetap dilakukan oleh Perangkat OPD selaku pengguna barang. OPD memanfaatkan aset tetap untuk menunjang kegiatannya serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan sesuai dengan bidang tupoksi masing masing OPD. Disisi lain, aset tetap yang sudah tidak digunakan ataupun tidak dihapuskan bisa dipinjamgunakan dan dihibahkan ke organisasi masyarakat, LSM, sekolah, ataupun untuk pembangunan sarana prasarana publik.

4. Transparansi

Keterbukaan penyampaian informasi kegiatan pengelolaan aset tetap kepada publik dilakukan baik melalui media elektronik seperti website maupun media konvensional. Keterbukaan publik untuk rincian aset tetap masih belum dilakukan karena aset tetap menjadi bagian dari Neraca di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dokumen laporan Neraca Aset dimuat di website Pemerintah Kabupaten Semarang serta Badan Keuangan Daerah. Untuk keterbukaan informasi kegiatan seperti pelelangan dimuat di Koran, spanduk, dan papan pengumuman.

Upaya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan aset tetap kepada publik, salah satunya dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Aset. Dalam SIM Aset, selain keterbukaan informasi bisa diakses oleh Perangkat OPD, rencananya juga akan bisa diakses oleh masyarakat. Hal lain yang sedang diupayakan yaitu memasang tanda pengenal atau tanda kepemilikan untuk semua aset tetap milik daerah seperti tanah, kendaraan dinas, dan peralatan lainnya.

Kendala dan hambatan dalam melakukan transparansi berhubungan dengan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Sarana prasarana yang ada di Bidang Pengelolaan Aset Daerah masih kurang seperti komputer

dan sarana penunjang lainnya, terlebih dengan adanya pengembangan SIM Aset yang membutuhkan sistem jaringan dan alat kelengkapan penunjang lainnya yang ternyata juga masih minim. SDM aparatur yang ada juga menjadi kendala karena terbatas pengetahuan dan kompetensinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap dapat dinyatakan baik. Kinerja organisasi yang cukup baik tersebut cerminan dari empat dimensi kinerja organisasi, yaitu Efektifitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Transparansi. Walaupun kinerja secara keseluruhan sudah dikatakan baik namun kinerjanya tetap perlu ditingkatkan, karena masih terdapat beberapa kendala yang membuat kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD dalam pengelolaan aset tetap belum optimal. Kendala itu adalah lemahnya koordinasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan pihak OPD dan BPN, belum punya gudang aset, masih kurang transparan, minimnya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai yang tidak sesuai, serta kurang memadainya sarana dan prasarana.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan diambil dari hasil analisis kinerja organisasi yang didasarkan atas empat dimensi. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Koordinasi berkelanjutan dengan petugas BPN Kabupaten Semarang terkait dengan proses sertifikasi tanah milik Daerah.
2. Mencari tempat alternatif untuk penyimpanan barang/aset selain di belakang Gedung Pemuda Ambarawa
3. Mengadakan Diklat pegawai

khususnya dalam bidang IT kaitannya dengan pengembangan pelaksanaan SIM Aset.

4. Sosialisasi dan koordinasi yang berkelanjutan kepada semua OPD terkait pentingnya penyusunan RKBMD yang aktual dan ketertiban dalam pelaporan aset.
5. Peningkatan transparansi dengan menyajikan informasi tentang kegiatan Bidang Pengelolaan Aset dalam pengelolaan aset tetap secara *up to date* di media cetak, website, papan pengumuman, spanduk, dan lain sebagainya.
6. Pengadaan penambahan sarana prasarana seperti komputer, sistem jaringan, dan alat kelengkapan penunjang lainnya berkaitan dengan pengembangan SIM Aset yang membutuhkan sarana prasarana yang memadai.
7. Konsistensi pemasangan tanda pengenal atau tanda kepemilikan untuk semua aset tetap milik daerah sebagai bukti bahwa aset tersebut memang milik daerah dan merupakan salah satu bentuk pengamanan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratminto & Winarsih, Septi Atik. 2005. *Manajeme Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andayani, Wuryan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Banyumedia
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Keown, Arthur, et all. 2008. *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan*. Jakarta : PT. Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang tahun 2010 - 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

